

Bank Kaltimara Siap Mendanai Proyek KPBU RSUD IA Moeis Samarinda Bagian Kesepakatan RI-Australia



Bangunan RSUD IA Moeis Samarinda akan direnovasi dan diperluas dengan konsep smart hospital dan green building, menjadikannya pionir KPBU sektor kesehatan di Indonesia.

(Sumber gambar: tribunkaltim.co) Senin, 09/06/2025

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Proyek pengembangan RSUD IA Moeis melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), tidak lagi sebatas agenda Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Kini, proyek tersebut telah bertransformasi menjadi bagian dari kesepakatan strategis dua negara, yakni Indonesia dan Australia.

Walikota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa proyek senilai kurang lebih Rp740 miliar itu, kini berada dalam payung kerja sama resmi antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.

Ia menegaskan bahwa proses panjang yang telah dilalui sejak tiga tahun terakhir akhirnya berbuah manis. Setelah berbagai upaya intensif termasuk koordinasi dengan Kementerian Keuangan, SNI, PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia), serta sejumlah *sounding market* di Jakarta dan Samarinda, RSUD IA Moeis berhasil masuk dalam daftar proyek investasi resmi antarnegara.

“Kesepakatan tersebut telah tercantum dalam dokumen resmi negara, termasuk laman *web* Perdana Menteri Australia serta buku biru milik Kementerian PPN/Bappenas. Kita sudah bisa lihat secara resmi di laman *website* Perdana Menteri Australia dan Indonesia. Maka kita patut bersyukur,” tegas Andi Harun.

Proyek ini dijalankan dengan skema pembiayaan KPBU, yang memberi peluang besar bagi partisipasi publik dalam pembiayaan. Berdasarkan ketentuan, 70 persen dari total

nilai investasi KPBU dibuka untuk pembiayaan oleh pihak swasta, termasuk sindikasi perbankan.

"Dan dalam hal ini, Bankaltimtara berminat secara tunggal, plus minus kegiatan ini akan menghabiskan dana investasi kurang lebih sekitar Rp740 miliar. Yang dilepas ke publik itu 70 persen dari nilai tersebut, artinya ada sekitar Rp500 miliar lebih yang bisa dibiayai oleh sindikasi perbankan atau pihak lembaga keuangan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Bankaltimtara telah menyatakan komitmennya untuk menjadi penyandang dana tunggal untuk pembiayaan 70 persen tersebut, menunjukkan tingginya minat dari lembaga keuangan daerah terhadap proyek ini. "Bankaltimtara berminat dan menyanggupi, maka tugas kita pemerintah memfasilitasi dengan investor," terang Wali Kota.

Minat ini tidak datang dari satu pihak saja. Sebelumnya, beberapa bank nasional juga telah menyatakan ketertarikan mereka terhadap proyek ini. Namun, sesuai dengan mekanisme KPBU, keputusan akhir berada di tangan investor dan lembaga penjamin, bukan di tangan pemerintah daerah.

"Jadi bukan pemerintah yang mengambil keputusan. Ini merupakan kesepakatan dari pihak investor yang nanti didampingi oleh PII, SNI, dan lainnya sebagai elemen *stakeholder* dalam proyek KPBU RSUD IA Moeis," jelasnya.

Seperti diketahui, proyek KPBU RSUD IA Moeis merupakan kerja sama antara Pemerintah Kota Samarinda dengan konsorsium Plenary Group (Australia) dan Aspen Medical (Singapura). Proyek ini tidak hanya bertujuan meningkatkan infrastruktur kesehatan dengan konsep *green building* dan *smart hospital*, tetapi juga menerapkan sistem manajemen berbasis kinerja melalui kontrak *Service Level Agreement* (SLA).

Dengan investor utama Plenary Group dari Australia dan Aspen Medical dari Singapura yang telah lolos tahap prakualifikasi, RSUD IA Moeis akan segera bertransformasi menjadi rumah sakit berstandar global. Transformasi tersebut mencakup peningkatan infrastruktur fisik, pengadaan peralatan medis modern, hingga sistem manajemen rumah sakit berbasis digital dan profesional. "Ini tentu kebanggaan warga Samarinda. Apalagi ini KPBU pertama di RS di Indonesia," pungkas Andi Harun. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Bank Kaltimtara Siap Mendanai Proyek KPBU RSUD IA Moeis Samarinda Bagian Kesepakatan RI-Australia, 09/06/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres 38/2015), dijelaskan sebagai berikut.
 - a. angka 6
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang

telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

b. angka 7

Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

2. Dalam Pasal 5 ayat (2) huruf q Perpres 38/2015 diatur bahwa infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial berupa infrastruktur kesehatan.